

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan. Melalui Pusat Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan yang ditujukan langsung kepada masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan di seluruh nusantara. Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan mencapai 19.045 orang, melampaui target yang ditetapkan sebesar 14.800 orang atau setara dengan capaian 128,68 persen pada Triwulan IV¹. Capaian ini mencerminkan komitmen KKP dalam memperluas jangkauan pemberdayaan, di mana bidang penangkapan ikan menjadi salah satu fokus utama dengan ribuan peserta yang tersebar di lima balai pelatihan utama, yaitu BPPP Ambon, BPPP Medan, BPPP Bitung, BPPP Tegal, dan BPPP Banyuwangi.

Masyarakat KP dilatih berdasarkan Satuan Kerja				
No.	Satker	Target PK (orang)	Realisasi TW IV (orang)	Capaian (%)
1	Balai Ambon	400	715	178,75%
2	Balai Medan	430	456	106,05%
3	Balai Bitung	400	475	118,75%
4	Balai Tegal	12.540,00	15629	124,63%
5	Balai Banyuwangi	1.030,00	1770	171,84%
Total		14.800	19.045	128,68%

Gambar 1. 1Masyarakat KP Dilatih Berdasarkan Satuan Kerja

Dalam konteks pelatihan penangkapan ikan, data menunjukkan partisipasi yang sangat signifikan dari masyarakat nelayan tradisional yang

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025). Laporan Kinerja Tahun 2025. Jakarta: KKP.

berasal dari daerah pesisir dan kepulauan. Program-program seperti “Pelatihan Penangkapan Ikan dengan Pancing Tonda” di BPPP Banyuwangi pada September 2025, misalnya, melibatkan ratusan peserta per angkatan dengan karakteristik mayoritas berpendidikan SMA/SMK sederajat dan berdomisili di wilayah pedesaan. Keberhasilan realisasi tersebut tidak terlepas dari upaya KKP dalam menjaga kontinuitas program di tengah berbagai tantangan operasional, namun juga mengindikasikan bahwa model pelatihan yang diterapkan harus mampu mengakomodasi kebutuhan praktis lapangan sekaligus efisiensi sumber daya yang semakin terbatas².

Dalam kacamata disiplin ilmu Pendidikan Masyarakat, penyelenggaraan pelatihan penangkapan ikan bagi nelayan pesisir pada hakikatnya merupakan wujud nyata pelaksanaan pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat nelayan tidak diposisikan sekadar sebagai target administratif penerima program diklat pemerintah, melainkan sebagai komunitas pembelajar dewasa (*adult community learners*) yang membutuhkan intervensi pendidikan nonformal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial mereka. Oleh karena itu, peralihan model pelatihan ke skema *hybrid* akibat efisiensi anggaran harus dievaluasi ketercapaiannya berdasarkan prinsip utama Pendidikan Masyarakat, yaitu sejauh mana skema baru ini tetap menjamin terjadinya proses keberdayaan, partisipasi aktif, dan peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi masyarakat nelayan di lapangan.

Secara tradisional, pelatihan offline atau tatap muka murni di Pusat Pelatihan KKP memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar, terutama untuk komponen transportasi peserta dari daerah terpencil, akomodasi, konsumsi, sewa fasilitas, serta honorarium instruktur dan pendamping lapangan. Bagi peserta yang berasal dari komunitas nelayan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), biaya perjalanan dan waktu yang dihabiskan untuk mengikuti pelatihan luring yang berlangsung berhari-hari sering kali menjadi hambatan utama yang mengurangi partisipasi dan efektivitas program. Kondisi ini semakin diperparah oleh karakteristik pekerjaan

² Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja Tahun 2025. Jakarta: KKP.

nelayan yang bersifat musiman dan bergantung pada cuaca serta hasil tangkapan, sehingga kehadiran penuh dalam pelatihan offline menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan usaha mereka sehari-hari.

Memasuki tahun 2025, kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat memberikan dampak signifikan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggaran KKP mengalami pemangkasan sebesar Rp2,12 triliun dari pagu awal Rp6,2 triliun menjadi Rp4,10 triliun, yang memaksa seluruh unit kerja, termasuk Pusat Pelatihan, untuk melakukan penyesuaian radikal dalam penyelenggaraan program³. Dalam kondisi tersebut, peralihan model pelatihan dari sepenuhnya offline ke *hybrid* yang menggabungkan sesi teori secara daring dengan praktik langsung secara luring menjadi strategi adaptasi yang paling rasional untuk menjaga kontinuitas dan kualitas program tanpa mengorbankan target capaian indikator kinerja. Model *hybrid* memungkinkan pengurangan biaya logistik secara substansial sekaligus memperluas jangkauan peserta hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pelatihan tatap muka.

Kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2,12 triliun pada Tahun Anggaran 2025 memang menjadikan peralihan moda pelatihan dari offline murni ke *hybrid* sebagai pilihan adaptasi yang tidak terelakkan bagi instansi pemerintah. Namun demikian, efisiensi di tingkat anggaran masukan (*budget input*) tidak secara otomatis menjamin efektivitas pada tingkat keluaran (*output*) maupun dampak kompetensi (*outcome*) di tingkat peserta pelatihan. Di sinilah letak urgensi mendasar dari pengukuran persepsi peserta. Penelitian persepsi ini dilakukan bukan sekadar untuk memenuhi alasan formal bahwa topik ini belum pernah diteliti sebelumnya, melainkan karena persepsi merupakan filter kognitif dan afektif utama yang menentukan keberhasilan *transfer of training* atau penerapan hasil belajar di tempat kerja.

³ Seknas Fitra. (2025). Efisiensi Anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan Berisiko Tingkatkan Angka Kemiskinan Nelayan di Indonesia., <https://seknasfitra.org/efisiensi-anggaran-di-kementerian-kelautan-dan-perikanan-berisiko-tingkatkan-angka-kemiskinan-nelayan-di-indonesia/>.

Masyarakat nelayan sebagai pembelajar dewasa memiliki tingkat otonomi dan orientasi kepraktisan yang tinggi dalam belajar. Apabila nelayan mempersepsikan komponen daring dalam skema *hybrid* sebagai sesuatu yang rumit, tidak relevan, atau berjarak dari realitas melaut, mereka akan cenderung mengabaikan materi teoretis tersebut yang berujung pada terjadinya kebocoran penyerapan materi (*learning loss*). Jika hal ini terjadi, maka efisiensi anggaran yang diniatkan oleh pemerintah justru akan berbalik menjadi pemborosan anggaran (*budget waste*), karena alokasi dana yang dikeluarkan untuk sesi *hybrid* gagal menghasilkan perubahan perilaku kerja maupun peningkatan produktivitas tangkapan nelayan. Oleh karena itu, pengukuran persepsi secara empiris sangat mendesak untuk menjawab permasalahan utama, yaitu apakah pemangkasan anggaran dan peralihan ke skema *hybrid* tetap mampu mempertahankan efektivitas dan kualitas pembelajaran bagi masyarakat nelayan di lapangan.

Keunggulan model *hybrid* dalam konteks efisiensi anggaran telah terbukti dalam berbagai praktik diklat pemerintahan dan vokasi di Indonesia. Dengan memanfaatkan platform digital untuk penyampaian materi teori dan modul asinkron, biaya per peserta dapat ditekan hingga 30–40 persen dibandingkan model offline penuh, sementara komponen praktik lapangan tetap dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi teknis bidang penangkapan ikan⁴. Namun, keberhasilan implementasi *hybrid* sangat bergantung pada persepsi dan kesiapan peserta, khususnya nelayan yang mayoritas memiliki keterbatasan akses internet, perangkat digital, serta literasi teknologi. Persepsi negatif terhadap aspek daring seperti kualitas interaksi, kejelasan materi, dan dukungan teknis dapat mengurangi motivasi dan hasil belajar, sedangkan persepsi positif terhadap fleksibilitas waktu dan penghematan biaya perjalanan dapat meningkatkan partisipasi secara keseluruhan.

Penelitian terdahulu mengenai pelatihan vokasi *hybrid* di sektor perikanan dan kelautan menunjukkan bahwa efektivitas model ini sangat

⁴ Irwanto, I. (2022), "Vocational Education National Seminar (VENS) Kendala Pembelajaran Daring Bagi Pelajar SMK Di Se-Kota Serang-Banten Pada Pandemi COVID-19," 133–41.

dipengaruhi oleh tiga dimensi utama, yaitu kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lapangan, metode penyampaian yang interaktif, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung baik daring maupun luring, serta kemampuan instruktur dalam penyampaian materi. Di lima balai pelatihan KKP, penerapan *hybrid* telah dilakukan secara bertahap pada program-program penangkapan ikan, pengolahan, dan konservasi dengan realisasi yang tinggi pada Triwulan IV 2025. Meskipun demikian, belum terdapat kajian kuantitatif yang secara komprehensif mengukur persepsi peserta terhadap peralihan ini dengan menggunakan instrumen survei yang terstruktur berdasarkan indikator-indikator teori pelatihan⁵.

Kesenjangan penelitian ini menjadi semakin krusial mengingat karakteristik unik peserta pelatihan penangkapan ikan di KKP, yang sebagian besar adalah nelayan kecil dengan tingkat pendidikan formal rendah hingga menengah dan pengalaman kerja yang didominasi oleh praktik tradisional. Persepsi mereka terhadap *hybrid* training tidak hanya mencerminkan kepuasan terhadap layanan, tetapi juga menjadi indikator penting bagi keberlanjutan program pemberdayaan SDM kelautan dan perikanan di tengah tekanan efisiensi anggaran nasional. Tanpa pemahaman mendalam mengenai bagaimana peserta menilai efektivitas kurikulum, metode, sarana-prasarana, dan instruktur *hybrid* dibandingkan offline, rekomendasi perbaikan yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran.

Sebagai data awal, hasil pengisian kuesioner oleh 32 peserta pelatihan penangkapan ikan dari lima balai (BPPP Medan 11 orang, Ambon 8 orang, Tegal 6 orang, Bitung 5 orang, dan Banyuwangi 2 orang) menunjukkan persepsi peserta terhadap pelatihan *hybrid* secara keseluruhan berada pada kategori cukup baik hingga baik (rata-rata skor 3,19 pada skala 1-4). Lebih dari 87% peserta menyatakan mudah memahami materi, merasa materi cocok dengan pekerjaan sehari-hari, serta menilai bahan ajar lengkap dan jelas. Namun, 62,5% peserta masih merasa kesulitan memahami materi

⁵ W. I. G. A. Wibowo, "Pengaruh Motivasi Berprestasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri Di SMK Negeri 2 Depok," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Vokasi*, 2023.

karena perbedaan cara penyampaian antara sesi online dan praktik, serta terdapat kendala teknis jaringan internet. Beberapa peserta menyampaikan preferensi agar pelatihan lebih menekankan praktik tatap muka. Data awal ini semakin mempertegas pentingnya penelitian kuantitatif yang lebih mendalam.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi peserta pelatihan penangkapan ikan di lima balai pelatihan KKP terhadap peralihan model dari offline ke *hybrid*, dengan fokus pada dimensi kurikulum, metode pelatihan, sarana-prasarana, dan instruktur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan perbaikan program pelatihan, sehingga KKP dapat terus mengoptimalkan anggaran yang terbatas sambil tetap menjaga kualitas dan relevansi pelatihan bagi masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan mendasar yang melatarbelakangi perlunya dilakukan penelitian ini, yaitu:

1. Peralihan model pelatihan ke *hybrid* belum didukung oleh data empiris yang memadai mengenai persepsi peserta. Meskipun KKP telah berhasil merealisasikan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan sebanyak 19.045 orang (128,68% dari target 14.800 orang) pada Triwulan IV Tahun 2025 di lima balai (Ambon, Medan, Bitung, Tegal, dan Banyuwangi), peralihan dari model offline murni ke *hybrid* yang didorong oleh pemangkasan anggaran sebesar Rp2,12 triliun belum disertai dengan pengukuran kuantitatif terhadap bagaimana peserta mayoritas nelayan tradisional mempersepsikan efektivitas model baru tersebut. Akibatnya, keberhasilan program hanya diukur dari sisi kuantitas partisipasi, bukan dari kualitas persepsi dan kepuasan peserta terhadap aspek

kurikulum, metode penyampaian, sarana-prasarana, serta kemampuan instruktur *hybrid*.

2. Tantangan adaptasi peserta terhadap komponen daring dalam model *hybrid*. Sebagian besar peserta pelatihan penangkapan ikan berasal dari komunitas nelayan di daerah pesisir dan kepulauan dengan keterbatasan akses internet, perangkat digital, serta literasi teknologi. Peralihan ke model *hybrid* yang mengandalkan sesi teori secara daring berpotensi menimbulkan kesenjangan persepsi, di mana peserta merasa kurang optimal dalam memahami materi dibandingkan dengan interaksi langsung pada pelatihan offline.
3. Kebijakan efisiensi anggaran yang mendorong peralihan ke *hybrid* bertujuan untuk menghemat biaya logistik dan memperluas jangkauan, namun belum diketahui secara pasti apakah penghematan tersebut berdampak pada penurunan persepsi peserta terhadap kualitas pelatihan, khususnya pada komponen praktik lapangan yang menjadi inti kompetensi penangkapan ikan. Jika persepsi peserta negatif, maka tujuan jangka panjang pemberdayaan SDM kelautan dan perikanan berisiko tidak tercapai secara optimal.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap terarah, terfokus, dan tidak meluas ke berbagai aspek yang tidak relevan, peneliti menetapkan batasan. Penelitian ini dibatasi pada pengukuran persepsi peserta pelatihan terhadap peralihan model pelatihan dari offline ke *hybrid* yang didorong oleh kebijakan efisiensi anggaran.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibatasi pada poin-poin utama mengenai kurangnya data empiris persepsi peserta, tantangan adaptasi terhadap komponen daring, serta potensi ketidaksesuaian antara tujuan efisiensi anggaran dengan harapan kualitas pelatihan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi peserta pelatihan penangkapan ikan terhadap peralihan model pelatihan dari offline ke *hybrid* di lima balai pelatihan Kementerian Kelautan dan Perikanan?

E. Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi peserta pelatihan penangkapan ikan terhadap peralihan model pelatihan dari offline ke *hybrid* di lima balai pelatihan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan nonformal dan pendidikan masyarakat, khususnya terkait persepsi peserta terhadap model pelatihan *hybrid* di sektor publik. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dalam pengembangan teori persepsi dalam konteks pendidikan vokasi dan pelatihan orang dewasa, serta memberikan kontribusi terhadap kajian adaptasi model pelatihan *hybrid* yang didorong oleh efisiensi anggaran di lembaga pemerintah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teoretis mengenai penerapan dimensi kurikulum, metode, sarana-prasarana, dan instruktur dalam evaluasi persepsi peserta pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pusat Pelatihan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan langsung bagi perbaikan dan pengembangan model pelatihan *hybrid* di

lima balai pelatihan KKP. Temuan mengenai persepsi peserta terhadap efektivitas, tantangan adaptasi, serta kesesuaian dengan tujuan efisiensi anggaran dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, memperbaiki kurikulum, metode penyampaian, penyediaan sarana dan prasarana, serta instruktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan peserta pelatihan penangkapan ikan.

2) Bagi Balai Pelatihan (Ambon, Medan, Bitung, Tegal, dan Banyuwangi)

Penelitian ini memberikan gambaran spesifik mengenai persepsi peserta di masing-masing balai, sehingga dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan program pelatihan *hybrid* di tingkat satuan kerja. Hasilnya dapat membantu balai dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi tantangan adaptasi peserta.

3) Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan metode kuantitatif survei untuk mengukur persepsi peserta pelatihan. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan kajian lanjutan bagi peneliti lain yang tertarik pada topik persepsi terhadap model pelatihan *hybrid*, efisiensi anggaran dalam pelatihan, atau pengembangan SDM di sektor kelautan dan perikanan.

4) Bagi Peserta Pelatihan dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Secara tidak langsung, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kualitas program pelatihan *hybrid* di masa mendatang, sehingga peserta khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan memperoleh manfaat yang lebih optimal dari program pemberdayaan SDM yang diselenggarakan oleh KKP.